



DAPAT 'SINYAL' DARI KPK Drainase Babaran Segera Dinormalisasi

YOGYA (KR) - Setelah selama dua bulan terkandung-katung, galian lubang akibat pekerjaan drainase di Jalan Babaran, akan segera ditutup. Dalam waktu dekat atau minggu kedua bulan ini, kegiatan normalisasi sudah mulai diagendakan.

Kepastian penanganan mangkraknya proyek akibat terseret kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ada 'sinyal' dari lembaga anti rasuah tersebut. "Semacam ada sinyal dari KPK, sehingga kami minta OPD teknis untuk berkoordinasi," jelas Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Senin (4/11).

Penanganan yang akan dilakukan oleh Pemkot ialah menormalisasi bekas galian menjadi seperti kondisi semula. Oleh karena itu, tiga galian yang kali ini masih dibiarkan menganga, akan ditutup dengan tanah, kemudian diaspal kembali. Selanjutnya, revitalisasi drainase di Jalan Babaran yang menjadi satu rangkaian dengan proyek Soepomo Cs, akan diagendakan kembali pada tahun depan.

Sementara Kepala Seksi Peningkatan Perairan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Herka Hanung Wijaya, mengungkapkan pekerjaan normalisasi drainase di Jalan Babaran akan menggunakan sistem swakelola. Sehingga dilakukan oleh petugas harian tanpa harus dengan proses lelang. "Sebelumnya kami pun sudah membersihkan saluran yang terlanjur digali. Sehingga tidak ada lagi sumbatan dan air

bisa mengalir lancar," jelasnya.

Terkait penutupan galian agar Jalan Babaran dapat kembali dilewati kendaraan, menurutnya, ditargetkan mulai minggu ke dua bulan ini. Setelah galian berhasil ditutup, langkah selanjutnya ialah melakukan cor. Masyarakat di wilayah setempat dinilai tidak perlu khawatir terkait kondisi galian. Selain aliran air sudah lancar, dinding galian juga dipastikan tidak akan mudah longsor.

Sejak petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa dan pengusaha pada akhir Agustus lalu, proyek Soepomo Cs termasuk drainase Jalan Babaran langsung berhenti aktivitas. Pemkot Yogya pun tidak bisa langsung melakukan langkah normalisasi guna menghormati proses hukum serta menjaga asas kehati-hatian. Dampaknya, kendaraan roda empat tidak bisa melintas pengendara sepeda motor pun harus ekstra hati-hati. Selain itu aktivitas ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat terpukul.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, berharap Pemkot memang harus bergerak cepat terhadap kepentingan publik. Dirinya menyayangkan, sinyal yang diterima Pemkot seyogianya berupa surat resmi, bukan sekadar lisan.

"Makanya Pemkot jangan hanya menunggu saja, tapi kejar terus ke KPK agar ada kepastian hukum. Kasihan masyarakat yang sudah terlalu sabar padahal kepentingan mereka sangat terganggu," katanya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005